



**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

JALAN RASAKUNDA – PANGKALPINANG TELP./FAX. (0717) - 437755

Website: <http://www.bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id>, email: info@bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholder*terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang. Renja Perubahan Tahun 2022 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Atas tersusunnya Renja Perubahan Tahun 2022 ini kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukanya. Semoga Renja Perubahan Tahun 2022 ini nantinya dapat menjadi bahan dalam penetapan Rencana Kerja (Renja) Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022.

Pangkalpinang, Agustus 2022
Plt.Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang



FADIRIZAL ST
Pembina I/II

NIP. 198502062008041001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDMD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BKPSDMD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	27
3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	27
3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	27
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
4.1 Rencana Program	31
4.1 Rencana Kegiatan	31
BAB V PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja BKPSDMD dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDMD Kota Pangkalpinang	16
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.....	20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDMD.....	28
Tabel 3.2	Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	29
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDMD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	34
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas BKPSDMD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023.....	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misidan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah memberikan informasi tentang rencana Perubahan program kegiatan perangkat daerah satu tahun ke depan. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah sebagai acuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah memberikan informasi tentang rencana Perubahan program kegiatan perangkat daerah satu tahun ke depan Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah sebagai acuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2022, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Sampai Triwulan II.

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian renstra BKPSDMD sampai dengan Triwulan II, analisis kinerja pelayanan BKPSDMD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja BKPSDMD, Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDMD Tahun 2022

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra BKPSDMD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) serta memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2022 melaksanakan 3 (Tiga) program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 17.367.327.450,- (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

TRIWULAN II
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	050301	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	15.474.381.850	100	378.887.567	100	1.175.593.766	0	0	0	0	100	1.554.481.333	100	10,046	Sekretariat
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		100		100		0		0		100		100		Sekretariat
				Persentase sarana dan prasarana Apratur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		100		100		0		0		100		100		Sekretariat
				Pesentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		0		0		0		0		0		Sekretariat
2		050301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:%)	100	14.810.413.500	25	348.977.567	50	906.022.298	0	0	0	0	50	1.256.999.865	50	8,487	Kasubbag PEP dan Keuangan
3		050301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (Dengan Satuan:Orang)	35	14.810.413.500	27	348.977.567	30	906.022.298	0	0	0	0	30	1.256.999.865	85,714	8,487	Kasubbag PEP dan Keuangan
4		050301205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	100	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							I		II		III		IV								
							1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5		050301205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai tugas dan fungsi (Dengan Satuan:Orang)	5	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
6		050301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum (Dengan Satuan:%)	100	282.291.050	25	0	50	147.637.511	0	0	0	0	50	147.637.511	50	52.300			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7		050301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan:jenis)	11	4.439.000	9	0	11	1.096.000	0	0	0	0	11	1.096.000	100	24.690			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8		050301206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Dengan Satuan:Set)	12	2.940.000	3	0	3	480.000	0	0	0	0	3	480.000	25	16.327			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9		050301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan (Dengan Satuan:jenis)	4	76.201.000	2	0	3	31.814.200	0	0	0	0	3	31.814.200	75	41.750			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10		050301206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan:Set)	14	48.711.050	10	0	11	17.761.250	0	0	0	0	11	17.761.250	75.571	36.462			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11		050301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan (Dengan Satuan:Kali)	35	150.000.000	18	0	25	96.486.061	0	0	0	0	25	96.486.061	71.429	64.324			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12		050301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa (Dengan Satuan:%)	100	276.905.500	25	23.100.000	50	84.644.657	0	0	0	0	50	107.744.657	50	38.910			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
13		050301208007	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal BKPSDM yang terlayani (Dengan Satuan:Orang)	46	105.900.000	44	0	46	40.360.457	0	0	0	0	46	40.360.457	100	38.112			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
14		050301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (Dengan Satuan:Unit)	26	10.993.000	8	0	8	1.603.000	0	0	0	0	8	1.603.000	30.769	14.582			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
15		050301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal BKPSDM yang terlayani (Dengan Satuan:Orang)	46	160.012.500	44	23.100.000	45	42.681.200	0	0	0	0	45	65.781.200	97.826	43.110			Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16		050301200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	94.771.800	25	6.810.000	50	35.289.300	0	0	0	0	50	42.099.300	50	44,422	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
17		050301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	34.873.400	1	3.460.000	1	8.440.000	0	0	0	0	1	11.900.000	100	34,123	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
18		050301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	38.400.000	4	0	4	20.824.300	0	0	0	0	4	20.824.300	100	54,230	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
19		050301209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	21.498.400	1	3.330.000	1	6.025.000	0	0	0	0	1	9.375.000	100	43,608	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		75,000	10,046	
PREDIKAT KINERJA																		S	SR	
20	-	050302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan:%)	7,500	758.165.600	2,250	37.514.000	3,540	151.435.000	0	0	0	0	3,540	188.949.000	47,200	24,922	Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	100		47		68		0	0			68		68		Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan:%)	100		57		68		0	0			68		68		Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
21		050302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pemberian informasi kepegawaian ASN (Dengan Satuan:%)	100	389.320.600	57	37.514.000	68	75.775.000	0	0	0	0	68	113.289.000	68	29.099	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
22		050302201002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan (Dengan Satuan:Orang)	165	17.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
23		050302201003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN (Dengan Satuan:Orang)	165	8.160.000	388	0	388	5.650.000	0	0	0	0	388	5.650.000	100	69.240	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
24		050302201006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan (Dengan Satuan:Orang)	100	2.750.000	48	0	73	0	0	0	0	0	73	0	73	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
25		050302201008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI (Dengan Satuan:event)	3	51.000.000	0	0	1	5.400.000	0	0	0	0	1	5.400.000	33,333	10.588	Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai
26		050302201009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile (Dengan Satuan:Data)	3.000	246.860.600	1.500	37.514.000	2.000	64.725.000	0	0	0	0	2.000	102.239.000	66,667	41.416	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
27		050302201010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan (Dengan Satuan:Website)	1	25.350.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
28		050302201011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola (Dengan Satuan:Orang)	250	37.500.000	352	0	355	0	0	0	0	0	355	0	100	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
29		050302202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan:%)	100	186.930.000	29.600	0	47	75.660.000	0	0	0	0	47	75.660.000	47	40.475	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
30		050302202001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi (Dengan Satuan:Orang)	20	107.670.000	0	0	7	47.500.000	0	0	0	0	7	47.500.000	35	44.116	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
						1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
31		050302202002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan (Dengan Satuan:Orang)	600	36.860.000	478	0	478	22.060.000	0	0	0	0	478	22.060.000	79,667	59,848	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
32		050302202003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS (Dengan Satuan:Kali)	11	42.400.000	1	0	3	6.100.000	0	0	0	0	3	6.100.000	27,273	14,387	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
33		050302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN (Dengan Satuan:%)	100	164.400.000	17	0	54	0	0	0	0	54	0	34	0	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
34		050302203001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN (Dengan Satuan:Orang)	100	58.150.000	0	0	22	0	0	0	0	22	0	22	0	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
35		050302203004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar (Dengan Satuan:Orang)	10	104.000.000	0	0	4	0	0	0	0	4	0	40	0	0	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
36		050302203014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan Fungsional (Dengan Satuan:Orang)	30	2.250.000	15	0	30	0	0	0	0	30	0	100	0	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
37		050302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN (Dengan Satuan:%)	100	17.515.000	76	0	82	0	0	0	0	82	0	82	0	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
38		050302204002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur (Dengan Satuan:Orang)	3.050	6.810.000	1.500	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	65,574	0	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
39		050302204004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	200	8.830.000	327	0	327	0	0	0	0	327	0	100	0	0	Sub Koordinator Proteksi ASN dan Kesejahteraan Pegawai
40		050302204008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner (Dengan Satuan:Kasus)	5	1.875.000	4	0	4	0	0	0	0	4	0	80	0	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	61,067	24,922	
PREDIKAT KINERJA																	R	SR	
41	-	050402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi (Dengan Satuan:%)	78	1.134.780.000	1	90.783.000	16	50.000.000	0	0	0	0	16	140.783.000	20,513	12,406	Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
42		050402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis (Dengan Satuan:%)	100	93.300.000	0	0	30	50.000.000	0	0	0	0	30	50.000.000	30	53,591	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
43		050402201003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi (Dengan Satuan:Orang)	100	93.300.000	0	0	30	50.000.000	0	0	0	0	30	50.000.000	30	53,591	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
44		050402202	Sertifikasi, Kelambagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi, kelambagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:%)	100	1.041.480.000	2	90.783.000	2	0	0	0	0	0	2	90.783.000	2	8,717	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
45		050402202007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan (Dengan Satuan:Orang)	150	1.041.480.000	3	90.783.000	3	0	0	0	0	0	3	90.783.000	2	8,717	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	20,513	12,406	
PREDIKAT KINERJA																	SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																	62,964	15,791	
PREDIKAT KINERJA																	R	SR	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						I		II		III		IV					
						1	2	3	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan pelaksanaan pencairan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- adanya pergeseran perencanaan anggaran dan bidang masih melengkapi persyaratan teknis pendukung pelaksanaan kegiatan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				- melaksanakan proses penilaian anggaran kegiatan sesuai dengan dijadwalkan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				- melaksanakan proses penilaian anggaran kegiatan sesuai dengan dijadwalkan													

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG
 BULAN : Triwulan II

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang	14.810.413.500	-	1.256.999.865	8.49	50	APBD Kota PKP	
		- Belanja gaji pokok PNS			14.124.589.368	-	622.389.720				
		- Belanja gaji pokok PPPK			-	-	0				
		- Belanja tunjangan keluarga PNS			127.321.093	-	64.293.016				
		- Belanja tunjangan jabatan PNS			108.199.000	-	63.529.950				
		- Belanja tunjangan fungsional PNS			43.050.000	-	21.000.000				
		- Belanja tunjangan fungsional umum PNS			20.879.250	-	11.125.000				
		- Belanja tunjangan beras PNS			85.216.614	-	43.379.580				
		- Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS			1.497.193	-	650.054				
		- Belanja pembulatan gaji PNS			10.734	-	7.545				
		- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS			242.146.248	-	422.850.000				
		- Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan			23.640.000	-	7.775.000				
		- Belanja Jasa Tenaga Administrasi			6.772.800	-	0				
		- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			27.091.200	-					
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	Orang	10.000.000	-	0	0.00	10	APBD Kota PKP	
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- ATK			-	-	0				
		- Belanja jasa kontribusi asosiasi			10.000.000	-	0				
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	11	Jenis	4.439.000	-	1.096.000	24.69	55	APBD Kota PKP	
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Alat Listrik			4.439.000	-	1.096.000				
		2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	set	2.940.000	-	480.000	16.33	55	APBD Kota PKP	

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
		- Belanja bahan - isi tabung pemadam kebakaran			1.500.000	-	0				
		- Belanja bahan - isi tabung gas			1.440.000	-	480.000				
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Jenis	76.201.000	-	31.814.200	41.75	55	APBD Kota PKP	
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- ATK			73.201.000	-	31.319.200				
		- Belanja makanan dan minuman jamuan tamu			3.000.000	-	495.000				
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14	Set	48.711.050	-	17.761.250	36.46	55	APBD Kota PKP	
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak			48.711.050	-	17.761.250				
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	kali	150.000.000	-	96.486.061	64.32	71	APBD Kota PKP	
		-Belanja perjalanan dinas biasa			150.000.000	-	96.486.061				
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46	Orang	105.900.000	-	40.360.457	38.11	50	APBD Kota PKP	
		- Belanja tagihan telepon			1.500.000	-	435.587				
		- Belanja tagihan listrik			60.000.000	-	22.361.370				
		- Belanja tagihan internet			44.400.000	-	17.563.500				
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Unit	10.993.000	-	1.603.000	14.58	55	APBD Kota PKP	
		- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin			2.035.000	-	0				
		- Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - Personal Komputer			5.585.500	-	0				
		- Belanja pemeliharaan komputer - Peralatan komputer - Peralatan Personal Komputer			3.372.500	-	1.603.000				
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46	Orang	160.012.500	-	65.631.200	41.02	50	APBD Kota PKP	
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- ATK			480.000	-	-				
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos			5.000.000	-	300.000				
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat / bahan untuk kegiatan kantor lainnya			6.342.100	-	1.581.200				
		- Belanja jasa tenaga administrasi			103.993.600	-	45.000.000				
		- Belanja jasa tenaga kebersihan			42.996.800	-	18.750.000				

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
		- Belanja jasa pengolahan sampah			1.200.000	-	0				
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	unit	34.873.400	-	11.900.000	34.12	50	APBD Kota PKP	
		- Belanja jasa tenaga supir			22.158.400	-	9.650.000				
		- Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan			1.315.000	-	0				
		- Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang			11.400.000	-	2.250.000				
		2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	unit	38.400.000	-	20.824.300	54.23	55	APBD Kota PKP	
		- Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan			7.200.000	-	1.774.300				
		- Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang			31.200.000	-	19.050.000				
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	21.498.400	-	9.375.000	43.61	50	APBD Kota PKP	
		- Belanja jasa tenaga keamanan			21.498.400	-	9.375.000				
	Program Kepegawaian Daerah										
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	165	orang	17.700.000	-	0	0.00	10	APBD Kota PKP	
		- Belanja lembur			17.700.000	-	0				
		2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	165	orang	8.160.000		5.650.000	69.24	100	APBD Kota PKP	
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			2.300.000		1.600.000				
		- Belanja lembur			5.860.000		4.050.000				
		3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100	orang	2.750.000	-	0	0.00	73	APBD Kota PKP	
		- Belanja paket/pengiriman			2.500.000	-	0				
		- Belanja Makanan dan minuman Rapat			250.000	-	0				

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
		4 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	3	event	51.000.000	-	5.400.000	10.59	49	APBD Kota PKP	
		- Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan			51.000.000	-	5.400.000				
		5 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	3000	Data	246.860.600		102.239.000	41.42	60	APBD Kota PKP	
		- Belanja makanan dan minuman rapat			450.000	-	0				
		- Belanja jasa tenaga administrasi			235.485.600	-	102.239.000				
		- Belanja lembur			10.925.000	-	0				
		5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	website	25.350.000	-	0	0.00	100	APBD Kota PKP	
		- Honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website			24.900.000	-	0				
		- Belanja makanan dan Minuman Rapat			450.000	-	0				
		6. Pengelolaan Data Kepegawaian	250	orang	37.500.000	-	0	0.00	100	APBD Kota PKP	
		- Belanja Modal Mesin Proses			25.000.000	-	0				
		- Belanja lembur			10.400.000	-	0				
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			600.000	-	0				
		- Belanja paket/pengiriman			1.500.000	-					
2	Mutasi dan Promosi ASN	1. Pengelolaan Mutasi ASN	20	orang	107.670.000	-	47.500.000	44.12	50	APBD Kota PKP	
		- Belanja Lembur			6.370.000	-	0				
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			89.800.000	-	47.500.000				
		- Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan			10.000.000	-	0				
		- Belanja paket/pengiriman			1.500.000	-	0				
		2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	600	orang	36.860.000	-	22.060.000	59.85	90	APBD Kota PKP	
		- Belanja makanan dan minuman jamuan tamu			-	-	0				
		- Honorarium narasumber atau pembahas			10.200.000	-	9.100.000				
		- Belanja paket/pengiriman			1.500.000	-	-				
		- Belanja lembur			25.160.000	-	12.960.000				

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
		3. Pengelolaan Promosi ASN	11	kali	42.400.000	-	6.100.000	14.39	76	APBD Kota PKP	
		- Belanja Lembur			8.500.000	-	4.500.000				
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			33.900.000	-	1.600.000				
3	Pengembangan Kompetensi ASN	1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	100	orang	58.150.000	-	0	0.00	20	APBD Kota PKP	
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			38.900.000	-	0				
		- Belanja Lembur			9.500.000	-	0				
		- Honorarium Penyelenggara Ujian			9.750.000	-	0				
		2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	10	orang	104.000.000	-	0	0.00	60	APBD Kota PKP	
		- Belanja beasiswa tugas belajar S1			24.000.000	-	0				
		- Belanja beasiswa tugas belajar S2			80.000.000	-	0				
		3. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	30	orang	2.250.000	-	0	0.00	100	APBD Kota PKP	
		- Belanja paket/pengiriman			2.000.000	-	0				
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			250.000	-	0				
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3050	orang	6.810.000	-	0	0.00	60	APBD Kota PKP	
		- Belanja makanan dan minuman Rapat			750.000	-	0				
		- Belanja Lembur			6.060.000	-	0				
		2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Pegawai	200	orang	8.830.000	-	0	0.00	100	APBD Kota PKP	
		- Belanja paket/pengiriman			8.830.000	-	0				
		3. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5	kasus	1.875.000	-	0	0.00	95	APBD Kota PKP	
		- Belanja paket/pengiriman			1.500.000	-	0				
		- Belanja makanan dan minuman Rapat			375.000	-	0				

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum - Belanja makanan dan minuman rapat - Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia - Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	100	orang	93.300.000	-	50.000.000	53.59	60	APBD Kota PKP	
			</								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Analisis kinerja pelayanan BKPSDMD Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kepegawaian merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok **"Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan"**, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
2. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2022, maka dapat diuraikan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					1067 341	1035 308	1008 273	100	BKPSDMD
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 1408	95 1343	90 1281	7.8	
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 99	95 95	90 90	100	

NO	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	100	100	100%	100%	100	100	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			7.04	7.05	7.5	7.8	7.05%	23,40%	7.5	7.8	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	100	100	100%	36%	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi BKPSDMD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu strategis di bidang kepegawaian, adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan penempatan ASN yang disesuaikan dengan kompetensi Jabatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan formasi jabatan fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Selain isu-isu penting di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD antara lain :

Permasalahan :

1. Aparatur Sipil Negara tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi).
2. Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja terhadap jabatan.
3. Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi dan pendidikan dan pelatihan formal kepada seluruh pegawai dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Promosi terbuka hanya terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
5. Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja.
6. Absensi belum terintegrasi dengan sistem pembayaran tunjangan kinerja pegawai
7. Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik.
8. Arsip data pegawai dari PNS masih belum masuk semuanya ke BKPSDMD.

Penghambat :

1. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian belum optimal.
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.

Pendorong :

1. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
2. Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat.
3. Adanya kewenangan dalam manajemen dibidang kepegawaian.

Kekuatan :

Sedangkan kekuatan (*strenght*) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur.
2. Kemauan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya semangat belajar dari sumber daya aparatur.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				15.474.381.850	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.992.481.084	
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.675.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA/ RENJA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	2		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA/ RENJA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	2		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	1		0 Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	1		0
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	1		0 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	1	6.675.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang tersusun	Dokumen	2		0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang tersusun	Dokumen	2		0
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen SPIP, LAKIP, dan RB)	Dokumen	3		0 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen SPIP, LAKIP, dan RB)	Dokumen	3		0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			37	14.810.413.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			37	3.019.733.734	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	32	14.810.413.500	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	32	3.019.733.734	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penataan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	1		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penataan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	1		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi SKPD	laporan	1		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi SKPD	laporan	1		
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	dokumen	1		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	dokumen	1		
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	laporan	1		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	laporan	1		
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				0	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				0	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah yang disusun	Laporan	1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah yang disusun	Laporan	1		
		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	100			Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	100		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	unit	1		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	unit	1		
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	Stel	47		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	Stel	47		
	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan ASN yang meninggal dunia	Orang	3		Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan ASN yang meninggal dunia	Orang	3		
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Orang	5	10.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Orang	5	10.000.000	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			129	282.291.050	Administrasi Umum Perangkat Daerah			129	477.212.050	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	11	4.439.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumiah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	11	5.657.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	set	12	2.940.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	set	12	2.940.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis	4	76.201.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis	4	84.788.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Set	14	48.711.050	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Set	14	39.247.050	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	koran	3		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	koran	3		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	kali	35	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	kali	35	344.579.500	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata	berkas	50		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata	berkas	50		
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	78.166.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Unit	0	-	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Unit	0	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan	unit	1		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan	unit	1	78.166.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (termasuk tambah daya)	unit	0	-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (termasuk tambah daya)	unit	0	-	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	0	-	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	0	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			168	276.905.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			168	281.622.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tertata	surat	50		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tertata	surat	50		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang	46	105.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang	46	105.900.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	unit	26	10.993.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	unit	26	10.037.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang	46	160.012.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang	46	159.685.500	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6	94.771.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6	119.071.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kenararan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	1	34.873.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kenararan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	1	39.173.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/lapangan yang dipelihara	Unit	4	38.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/lapangan yang dipelihara	Unit	4	58.400.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	-	
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1		Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumah aset tetap lainnya yang dipeliera	Unit	1		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0	21.498.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0	21.496.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0		
	KEPEGAWAIAN					KEPEGAWAIAN					
	Program Kepegawaian Daerah			8.080	758.165.600	Program Kepegawaian Daerah			8.080	1.119.075.600	
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			3.976	389.320.600	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			3.976	605.480.600	
	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	orang	200	17.700.000	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	orang	200	17.700.000	
	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	Orang	387	8.160.000	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	Orang	387	15.260.000	
	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	Orang	135	2.750.000	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	Orang	135	7.710.000	
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	event	3	51.000.000	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	event	3	246.100.000	
	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	data	3.000	245.860.600	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	data	3.000	255.860.600	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	website	1	25.350.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	website	1	25.350.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola	orang	250	37.500.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola	orang	250	37.500.000	
		Rasio pegawai fungsional	%	7.5			Rasio pegawai fungsional	%	7.5		
	Mutasi dan Promosi ASN			633	186.930.000	Mutasi dan Promosi ASN			633	376.680.000	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	Orang	25	107.670.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	Orang	25	263.120.000	
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	Orang	600	36.660.000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	Orang	600	94.260.000	
	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS		8	42.400.000	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS		8	19.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100		
	Pengembangan Kompetensi ASN			89	164.400.000	Pengembangan Kompetensi ASN			89	119.400.000	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	Orang	30	58.150.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	Orang	30	9.500.000	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mempunyai sertifikasi sesuai dengan kompetensi dan keahlian dalam jabatan	Orang	25	-	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mempunyai sertifikasi sesuai dengan kompetensi dan keahlian dalam jabatan	Orang	25	-	
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	Orang	4	104.000.000	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	Orang	4	104.000.000	
	Facilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	Orang	30	2.250.000	Facilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	Orang	30	5.900.000	
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78,00			Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78,00		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			3.382	17.515.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			3.382	17.515.000	
	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	orang	3.050	8.810.000	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	orang	3.050	8.810.000	
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	orang	327	8.830.000	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	orang	327	8.830.000	
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	kasus	5	1.875.000	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	kasus	5	1.875.000	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			246	1.134.780.000	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			246	1.224.511.000	
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100		
	Pengembangan Kompetensi Teknis			50	93.300.000	Pengembangan Kompetensi Teknis			50	147.600.000	
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	Orang	50	93.300.000	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	Orang	50	147.600.000	
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78.00			Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78.00		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			196	1.041.480.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			196	1.176.911.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	Orang	196	1.041.480.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	Orang	196	1.176.911.000	
					17.367.327.450					6.436.067.584	

BAB III **TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima (5) tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu :

“Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)”

3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu :

“Terlaksananya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi”

Tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Jangka Menengah					Kondisi Akhir RPJMD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59,07	59,11	61,39	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50
			Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)		Persentase ASN yang disiplin	Nilai	96.50	96.50	97.00	97.00	97.00	98.50	99.00	99.00
				Terlaksananya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	%	75	76	77	78	78	79	80	80

Tabel 3.2
Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	%	47,76	53,29	58,82	64,35	69,88	75,41	80,94	80,94	BKPSDMD
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	54,15	54,69	55,37	61,50	67,62	78,50	95,51	95,51	
Indeks Reformasi Birokrasi sub komponen penataan sistem manajemen SDM	Nilai	NA	NA	61,50	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50	
Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	NA	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	
Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	%	NA	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					1067 341	1035 308	1008 273	100	BKPSDMD
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 1408	95 1343	90 1281	7.8	
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 99	95 95	90 90	100	
Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%					77	78	79	79	

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi misi. Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan. Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program dijabarkan dalam 11 (Sebelas) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program

Pada Tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang terdiri dari :
 - Program Kepegawaian Daerah
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Program Pendukung, yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Rencana Kegiatan

1. Kegiatan Prioritas
 - 1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.
 - b. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK.
 - c. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - d. Fasilitasi lembaga profesi ASN
 - e. Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN
 - f. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
 - g. Pengelolaan data kepegawaian
 - 2) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan mutasi ASN
 - b. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 - c. Pengelolaan promosi ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
 - b. Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN

- c. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
- d. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 - b. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
 - c. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
- 5) Pengembangan Kompetensi teknis, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.
- 6) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.
- 2. Kegiatan Pendukung
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - e. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - e. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
 - b. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - c. Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas
 - d. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
- 6) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - b. Pengadaan aset tetap lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan
 - c. Pemeliharaan aset tetap lainnya
 - d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KOTA PANGKALPINANG

Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022					Catatan Penting
					target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sebelum)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sesudah)	Total Penambahan/Pengurangan	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				409	15,474,381,850	3,992,481,084			
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100				%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9	-	6,675,000	6,675,000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tertaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA/ RENJA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	2	-		0	Dana Alokasi Umum	Dokumen
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA BKPSDMD	Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	1	-	-	0	Dana Alokasi Umum	Dokumen
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA BKPSDMD	Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	1	-	6,675,000	6,675,000	Dana Alokasi Umum	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tertaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang tersusun	Dokumen	2	-	-	0	Dana Alokasi Umum	Dokumen
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tertaksananya penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen SPIP, LAKIP, dan RB)	Dokumen	3	-	-	0	Dana Alokasi Umum	Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				37	14,810,413,500	3,019,733,734	(11,790,679,766)		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tertaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	32	14,810,413,500	3,019,733,734	-11,790,679,766	Dana Alokasi Umum	orang
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Tertaksananya penataan dan pengujian/verifikasi dokumen keuangan	Jumlah dokumen penataan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	1	-		0	Dana Alokasi Umum	dokumen
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi SKPD	laporan	1	-		0	Dana Alokasi Umum	laporan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	-		0	Dana Alokasi Umum	laporan

Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022					Catatan Penting
					target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sebelum)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sesudah)	Total Penambahan/Pengurangan	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya dokumen tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	dokumen	1	-		0	Dana Alokasi Umum	dokumen
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	laporan	1	-		0	Dana Alokasi Umum	laporan
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				2	-	-	-		
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	-		0	Dana Alokasi Umum	Dokumen
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah yang disusun	Laporan	1	-		0	Dana Alokasi Umum	Laporan
			Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	100					%
	Administrasi Keppegawaian Perangkat Daerah				56	10,000,000	10,000,000	-		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	unit	1	-		0	Dana Alokasi Umum	unit
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	47	-		0	Dana Alokasi Umum	Stel
	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Meleaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Meleaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan ASN yang meninggal dunia	Orang	3	-		0	Dana Alokasi Umum	Orang
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Orang	5	10,000,000	10,000,000	0	Dana Alokasi Umum	Orang
			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100					%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				129	282,291,050	477,212,050	194,921,000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	11	4,439,000	5,657,000	1,218,000	Dana Alokasi Umum	Jenis

Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022					Catatan Penting
					target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sebelum)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sesudah)	Total Penambahan/Pengurangan	Sumber Dana	
1	2		3	4	5	6	7		8	9
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	set	12	2,940,000	2,940,000	0	Dana Alokasi Umum	set
	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya layanan Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis	4	75,201,000	84,788,500	8,587,500	Dana Alokasi Umum	jenis
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Set	14	48,711,050	39,247,050	-9,464,000	Dana Alokasi Umum	Set
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya layanan Penyediaan Bahan Bacaan/ Buku Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	koran	3	-	-	0	Dana Alokasi Umum	koran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	kali	35	150,000,000	344,579,500	194,579,500	Dana Alokasi Umum	kali
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Persuratan dan Arsip	Jumlah arsip dinamis yang ditata	berkas	50	-	-	0	Dana Alokasi Umum	berkas
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100					%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2	-	78,166,000	78,166,000		
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang disediakan	Unit	0	-	-	0	Dana Alokasi Umum	Unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1	-	-	0	Dana Alokasi Umum	unit
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan	unit	1	-	78,166,000	78,166,000	Dana Alokasi Umum	unit
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (termasuk tambah daya)	unit	0	-	-	0	Dana Alokasi Umum	unit
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	0	-	-	0		unit
			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100					%

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022					Catatan Penting
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sebelum)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sesudah)	Total Penambahan/Pengurangan	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			168	276,905,500	281,622,500	4,717,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tertata	surat	50	-		0	Dana Alokasi Umum	surat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang	46	105,900,000	105,900,000	0	Dana Alokasi Umum	orang
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	unit	26	10,963,000	16,037,000	5,044,000	Dana Alokasi Umum	unit
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang	46	160,012,500	159,685,500	-327,000	Pendapatan Daerah	orang
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100					%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6	94,771,800	119,071,800	24,300,000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/keperluan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	1	34,873,400	39,173,400	4,300,000	Pendapatan Daerah	Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/apungan yang dipelihara	Unit	4	38,400,000	58,400,000	20,000,000	Dana Alokasi Umum	Unit
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	-	-	0	Dana Alokasi Umum	Unit
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	-	-	0	Dana Alokasi Umum	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0	-	21,498,400	21,498,400	Pendapatan Daerah	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0	21,498,400	-	-21,498,400	Dana Alokasi Umum	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0	-	-	0	Dana Alokasi Umum	Unit

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022					Catatan Penting
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sebelum)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sesudah)	Total Penambahan/Pengurangan	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	KEPEGAWAIAN								
	Program Kepegawaian Daerah			8,080	758,165,600	1,119,975,600			
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100					%
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			3,976	389,320,600	605,480,600	216,160,000		
	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	orang	200	17,700,000	17,700,000	0	Dana Alokasi Umum	orang
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	Orang	387	8,160,000	15,260,000	7,100,000	Dana Alokasi Umum	Orang
	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	Orang	135	2,750,000	7,710,000	4,960,000	Dana Alokasi Umum	Orang
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	event	3	51,000,000	248,100,000	195,100,000	Dana Alokasi Umum	event
	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	data	3,000	246,860,600	255,860,600	9,000,000	Pendapatan Daerah	data
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	website	1	25,350,000	25,350,000	0	Dana Alokasi Umum	website
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola	orang	250	37,500,000	37,500,000	0	Dana Alokasi Umum	orang
		Rasio pegawai fungsional	%	7.5					%
	Mutasi dan Promosi ASN			633	186,930,000	376,680,000	189,750,000		
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	Orang	25	107,670,000	263,120,000	155,450,000	Dana Alokasi Umum	Orang
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	Orang	600	36,860,000	94,260,000	57,400,000	Dana Alokasi Umum	Orang

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022					Catatan Penting
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sebelum)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sesudah)	Total Penambahan/Pengurangan	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS		8	42,400,000	19,300,000	-23,100,000	Dana Alokasi Umum	
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100					%
	Pengembangan Kompetensi ASN			89	164,400,000	119,400,000	(45,000,000)		
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan mesa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	Orang	30	56,150,000	9,500,000	-43,650,000	Dana Alokasi Umum	Orang
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mempunyai sertifikasi sesuai dengan kompetensi dan keahlian dalam jabatan	Orang	25	-	-	0	Dana Alokasi Umum	Orang
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemkot Pangkelpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	Orang	4	104,000,000	104,000,000	0	Dana Alokasi Umum	Orang
	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	Orang	30	2,250,000	5,900,000	3,650,000	Dana Alokasi Umum	Orang
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78.00					
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			3,382	17,515,000	17,515,000	-		
	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	orang	3,050	6,810,000	6,810,000	0	Dana Alokasi Umum	orang
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	orang	327	8,830,000	8,830,000	0	Dana Alokasi Umum	orang

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022					Catatan Penting
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sebelum)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sesudah)	Total Penambahan/Pengurangan	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	kasus	5	1.875,000	1.875,000	0	Dana Alokasi Umum	kasus
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			246	1.134.780,000	1.324.511,000			
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100					%
	Pengembangan Kompetensi Teknis			50	93.300,000	147.600,000	54.300,000		
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	Orang	50	93.300,000	147.600,000	54.300,000	Dana Alokasi Umum	Orang
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78,00					
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			196	1.041.480,000	1.176.911,000	135.431,000		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	Orang	196	1.041.480,000	1.176.911,000	135.431,000	Dana Alokasi Umum	Orang
					17.367.327,450	6.438.067,684	(10.931.259,766)		

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KOTA PANGKALPINANG

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022					Catatan Penting
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sebelum)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sesudah)	Total Penambahan/Pengurangan	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	KEPEGAWAIAN								
	Program Kepegawaian Daerah			8.080	750.165.800	1.119.075.600	360.910.000		
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100					%
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			3.976	389.320.600	605.480.600	216.160.000		
	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	orang	200	17.700.000	17.700.000	0	Dana Alokasi Umum	orang
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	Orang	387	8.160.000	15.260.000	7.100.000	Dana Alokasi Umum	Orang
	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	Orang	135	2.750.000	7.710.000	4.960.000	Dana Alokasi Umum	Orang
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	event	3	51.000.000	246.100.000	195.100.000	Dana Alokasi Umum	event
	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	data	3.000	246.880.600	255.860.600	9.000.000	Pendapatan Daerah	data
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	website	1	25.350.000	25.350.000	0	Dana Alokasi Umum	website
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola	orang	250	37.500.000	37.500.000	0	Dana Alokasi Umum	orang
		Rasio pegawai fungsional	%	7.5					%
	Mutasi dan Promosi ASN			633	186.930.000	376.680.000	189.750.000		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022					Catatan Penting
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sebelum)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sesudah)	Total Penambahan/Pengurangan	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	Orang	25	107,670,000	263,120,000	155,450,000	Dana Alokasi Umum	Orang
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	Orang	600	36,860,000	94,260,000	57,400,000	Dana Alokasi Umum	Orang
	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS		8	42,400,000	19,300,000	-23,100,000	Dana Alokasi Umum	
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100					%
	Pengembangan Kompetensi ASN			89	164,400,000	119,400,000	(45,000,000)		
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	Orang	30	58,150,000	9,500,000	-48,650,000	Dana Alokasi Umum	Orang
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mempunyai sertifikasi sesuai dengan kompetensi dan keahlian dalam jabatan	Orang	25	-	-	0	Dana Alokasi Umum	Orang
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	Orang	4	104,000,000	104,000,000	0	Dana Alokasi Umum	Orang
	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	Orang	30	2,250,000	5,900,000	3,650,000	Dana Alokasi Umum	Orang
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78.00					
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			3,382	17,515,000	17,515,000	-		
	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	orang	3,050	6,810,000	6,810,000	0	Dana Alokasi Umum	orang
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	orang	327	8,830,000	8,830,000	0	Dana Alokasi Umum	orang
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	kasus	5	1,875,000	1,875,000	0	Dana Alokasi Umum	kasus

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022					Catatan Penting
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sebelum)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (sesudah)	Total Penambahan/Pengurangan	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			246	1.134.780.000	1.324.511.000			
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100					%
	Pengembangan Kompetensi Teknis			50	93.300.000	147.600.000	54.300.000		
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	Orang	50	93.300.000	147.600.000	54.300.000	Dana Alokasi Umum	Orang
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78.00					
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			196	1.041.480.000	1.176.911.000	135.431.000		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	Orang	196	1.041.480.000	1.176.911.000	135.431.000	Dana Alokasi Umum	Orang
					1.892.945.600	2.443.586.600	360.910.000		

BAB V PENUTUP

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan Rencana Kerja Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022. Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program yang dijabarkan dalam 11 (Sebelas) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan.

Sebagai penutup, apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai OPD pengelola kepegawaian Kota Pangkalpinang.